

JURNAL ILMIAH

fonema

(Jurnal Edukasi Bahasa & Sastra Indonesia)

Volume 2 Nomor 3, Januari 2014

Nuril HudaPeningkatan Kualitas Sekolah Berbasis Kultural
(hal. 99-108)**Sony Sukmawan**Perjumpaan Islam Sarengat-Kejawen dalam Sastra Lisan Lereng Arjuna:
Sebuah Kesadaran Multikultural
(hal. 109-119)**Sri Roekminiati**Kajian Kurikulum Perkoperasian di Perguruan Tinggi (Studi Kasus
di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Dr. Soetomo)
(hal. 120-136)**Haerussaleh**Si'ir, Pengaruhnya pada Kehidupan Masyarakat Sumenep Madura
(hal. 137-148)**Hetty Purnamasari & Boedi Martono**Perkembangan Linguistik Nusantara-Indonesia dan Permasalahannya
(hal. 149-160)

**JURNAL ILMIAH
"FONEMA"**

(Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia)

Terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian, kajian atau karya ilmiah di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pelindung

Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Peninjau

Prof. Sudiro Satoto, M.Pd

Ketua Penyunting

Haerussaleh

Penyunting Pelaksana

Ninik Mardiana
Ahmad Hatip
Nuril Huda

Staf Pelaksana

Lilik Rusdiana, Warsono, Taufiq

Penerbit

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Alamat Penerbit

Gedung C. 102 Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Jalan Semolowaru 84 Surabaya 60118
Telp (031) 5944748

**KAJIAN KURIKULUM PERKOPERASIAN DI PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya,
Universitas DR. Soetomo)**

Sri Roekminiati

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
arumfia@gmail.com

Abstract: The decision between the State Minister of Cooperatives and Small- Medium Enterprises Republic of Indonesia and the Indonesian Minister of National Education No.02/SKB/MENEG/VI/2000 and No. 4/U/SKB/2000 about to build a cooperative as a cornerstone of the economy. The problems in this study are the implications and barriers wisdom, How the Joint Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises and the Minister of National Education on Education Cooperation and Entrepreneurship in Higher Education. The purpose of this study is expected to be beneficial to the community (student / student) can pour his idea of cooperatives and entrepreneurship desired once their evaluation of the curriculum that has been implemented. This study focused on curriculum Cooperation in Higher Education 3 study sample is Airlangga, Unesa and Unitomo.

*The results of the study indicate that cooperative learning objectives in three university sample has not been growing interest in the students to enter the world of cooperatives and creating expertise learners to become principal / manager of the cooperative. Cooperative learning material between the material composition of the practice is 90 % and 10 % . It is a condition of waking up looking lame that should have been 30 % and 70 % . Learning instruments not rely on collaboration with partners and data systems owned cooperative government and private . By looking at the existing condition it demonstrates that the implication of the Joint Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises and the Minister of National Education on Education Cooperation and Entrepreneurship in Higher Education , is not significant .
Keywords : curriculum , cooperatives , university)*

LATAR BELAKANG

Tidak dapat dipungkiri koperasi merupakan salah satu roda penggerak perekonomian bangsa. Pengembangan perkoperasian di tanah air telah mencapai tiga dasawarsa lebih. Fluktuasi, jatuh-bangun, telah dialami dalam upaya memaknai fungsi koperasi sebagai “soko guru” perekonomian yang berbasis kerakyatan. Malangnya, prestasi yang dicapai koperasi belum mampu mengeskalisasi citra dan prestise-nya sebagai suatu lembaga yang sesuai dengan atributnya: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Redupnya citra koperasi mencuatkan aroma di kalangan pemuda bahwa koperasi bukanlah institusi yang prestisius untuk berkarier dan meniti masa depan. Sebuah fakta yang memilukan, ketika

tingkat pengangguran intelektual terus meningkat, saat pemuda para lulusan suatu jenjang pendidikan (*fresh graduates*) berburu dan berebut kerja, namun hampir tiada di antara mereka yang menjadikan koperasi sebagai salah satu institusi tujuan atau pilihan untuk mencari kerja, apa lagi meniti karier. Data di berbagai daerah menunjukkan bahwa koperasi dikelola (terutama) oleh kelompok mapan non kaum muda. Contoh: KUD di 12 kabupaten propinsi Jawa Timur dikelola oleh kalangan yang berusia di atas 45 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetap yang lain (90%). Belum ada (jarang) koperasi yang berbasis kaum muda (secara eksklusif). Keterlibatan

muda dalam koperasi lebih sebagai karyawan (bukan pengelola).

Peta lapangan pekerjaan di berbagai belahan dunia saat ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Semakin memburuknya keadaan ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kemampuan sektor ekonomi formal maupun informal dalam menyerap tenaga kerja baru. Di banyak negara sedang berkembang, kemiskinan, pengangguran dan inflasi semakin meningkat. Menurut perkiraan ILO, dari sejumlah 3 miliar angkatan kerja di dunia, 25 hingga 30% nya merupakan setengah pengangguran, dan sekitar 140 juta pekerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa lapangan pekerjaan di dunia saat ini dalam keadaan suram, sehingga terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan jalan keluar dalam mengatasi berbagai hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Untuk kasus di Indonesia, berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, dari 237 juta penduduk Indonesia jumlah angkatan kerja 116,00 (juta/orang), Bekerja 107,87 (juta/orang), Tingkat Pengangguran 8,59 (juta/orang), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK 67,83 (%), dan Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT 7,87 (%). Angkatan kerja di Indonesia hasil sensus penduduk 2010 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD, yaitu sekitar 35,2 persen

dari total angkatan kerja, bahkan angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah mencapai 50,4 persen. Sementara angkatan kerja yang berpendidikan di atas SMA hanya 8,5 persen dari total angkatan kerja. Hal ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah. (sumber: <http://www.bps.go.id>, diakses 12 April 2012)

Mencermati fenomena di atas, maka koperasi harus bangkit .. !!, agar dapat bangkit dengan tegap, koperasi harus merangkul orang muda yang enerjik, kreatif, inovatif dan produktif. Kepada orang muda, koperasi harus membuktikan bahwa dirinya sanggup memberdayakan dan mendampingi orang muda dalam meniti karier dan masa depannya. Kemampuan koperasi memberdayakan orang muda pada akhirnya berimbas pada pencitraan positif kelembagan koperasi. Singkat kata, koperasi perlu bangkit dan membangun simbiose mutualisme dengan orang muda: merangkul dan memberdayakan orang muda, dan kemudian memberi orang muda peluang untuk mencitra-positifkan koperasi.

Koperasi juga sangat memerlukan semangat kewirausahaan yang secara khusus disebut sebagai **wirakoperasi**. Ciri khusus seorang wirakoperasi adalah sikapnya yang lebih menghargai kebersamaan daripada keuntungan individual. Seorang wirakoperasi diharapkan akan lebih termotivasi dan kreatif dalam kebersamaan. Wirakoperasi berperan penting dalam tahap penumbuhan, pengembangan dan pada saat-saat terjadi krisis yang menggoncang koperasi. Wirakoperasi harus mampu mengatasi berbagai kebuntuan

yang sering terjadi dalam pengembangan koperasi. Kebuntuan pertama yang biasanya langsung membingungkan pelopor koperasi adalah dalam mengumpulkan modal dasar yang minimal agar koperasi dapat berjalan.

Untuk dapat menjadi pelaku perkoperasian tidak harus mereka yang mengenyam pendidikan ekonomi. Pelaku perkoperasian dapat berasal dari berbagai bidang di luar ekonomi, dalam hal ini teknik, sosial politik, farmasi, psikologi dan lain-lain. Mereka semua dengan berbagai bidang pendidikan perlu menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Ironinya, hanya program studi di fakultas ekonomi matakuliah perkoperasian masuk di kurikulum dan menjadi matakuliah wajib atau pilihan di tawarkan bagi peserta didik di perguruan tinggi. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajar, bila pengembangan perkoperasian sebagai sokoguru perkenomian kurang memasyarakat.

Selain itu, selama ini pengajaran perkoperasian yang ada pada umumnya diajarkan masih sebatas aspek kognitif. Dalam hal ini masih sebatas konsep, atau kemampuan berpikir. Sedangkan aspek afektif dan pskimotorik dalam pengajaran perkoperasian masih diabaikan. Akibatnya, tidak cukup bagi peserta didik sebagai pelaku perkoperasian. Dalam hal ini, untuk menjadikannya peserta didik sebagai pelaku perkoperasian dituntut ketiga aspek muatan pengajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Ketiga kesatuan aspek tersebut akan menjadikan peserta didik tidak hanya mempunyai pengetahuan, tetapi lebih

jauh akan membentuk peserta didik sebagai pelaku kegiatan berkoperasi.

Ditinjau dalam perpektif kebijakan telah lahir Keputusan bersama menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan dalam upaya membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian. Dalam keputusan bersama ini diinstruksikan di semua lembaga pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah umum (SMU), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SLB), perguruan tinggi, sanggar belajar (SKB) dan satuan pendidikan luar sekolah untuk memasyarakatkan dan mengembangkan pengetahuan perkoperasian dan kewirausahaan dan menyiapkan kader koperasi dan wirausaha yang profesional.

Memperhatikan berbagai fenomena di atas, yang sekilas terdapat indikasi terjadinya kesenjangan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan harapan dari kebijakan yang tertuang dalam keputusan bersama kedua menteri perihal perkoperasian dan kewirausahaan, maka dipandang perlu dilakukan kajian ini guna mengetahui sejauh mana implikasi Surat Keputusan Bersama tersebut terhadap pengembangan perkoperasian pada lembaga pendidikan, melalui pengembangan kurikulum program studi di Perguruan Tinggi.

PERMASALAHAN KAJIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi kebijaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi
2. Bagaimanakah hambatan implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama perihal Pengembangan Perkoperasian dan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi?

MANFAAT DAN TUJUAN KAJIAN

Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat (mahasiswa/mahasiswi) bisa menuang gagasannya tentang koperasi dan kewirausahaan yang dikehendaki sekaligus evaluasi mereka atas kurikulum yang selama ini diterapkan.

LANDASAN TEORI

a. Konsepsi Koperasi

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar koperasi, pada umumnya amat beragam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang profesi dan kompetensi keilmuan mereka serta sudah barang tentu dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang koperasi. Berikut ini disajikan sejumlah definisi koperasi dari beberapa ahli dan lembaga yang tertarik pada koperasi, yang semoga dapat memberikan wacana konseptual

paradigmatik tentang apa dan bagaimana koperasi.

- (1) Menurut Mohammad Hatta (1954:1)
Koperasi adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dalam koperasi tidak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan, namun semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Menurut I Gusti Gde Raka (1983:1)
Yang dimaksud dengan koperasi adalah satu badan yang mempunyai definisi legal dan merupakan organisasi ekonomi dengan ciri-ciri khusus.
- (2) Menurut U Purwanto, Bc.Hk. (1988:1)
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.
- (3) Menurut Ropke (1989:28)
Suatu organisasi bisnis yang para pemiliknya adalah juga pelanggan utama perusahaan itu, dapat diidentifikasi sebagai koperasi. Jadi, para pemilik dan pemakai dari pelayanan suatu unit bisnis yang bernama akoperasi adalah individu-individu yang pada saat yang sama juga menjadi anggota.
- (4) Menurut Alfred Hanel (1989:30)
Koperasi adalah organisasi yang dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi

individual para anggotanya; karenanya, koperasi adalah organisasi yang otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi, yang dilaksanakan secara bersama, untuk kepentingan bersama pula.

b. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Bertitik tolak dari pengertian koperasi, badan usaha koperasi mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dengan badan usaha bentukan sistem ekonomi kapitalis. Di tinjau sejarahnya, aturan yang harus dijalankan koperasi diciptakan untuk mengurangi dampak negatif dari sistem mekanisme pasar, seperti orientasi bisnis yang hanya mengacu pada keuntungan maksimal semata. Karenanya, perbedaan pertama, antara koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya adalah tujuan yang ingin dicapai. Koperasi lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan anggota daripada mengutamakan modal dan keuntungan, sedangkan badan usaha bentukan kapitalis lebih mengutamakan modal dan keuntungan daripada kesejahteraan bersama.

Perbedaan lain adalah permodalan. Koperasi harus menjalankan prinsip keanggotaan yang bebas terbuka. Artinya masyarakat bebas keluar masuk menjadi anggota koperasi, pada hal keanggotaan ini terkait dengan simpanan yang harus diberikan anggota pada koperasi. Akibatnya kuantitas

modal di koperasi berubah-ubah sesuai keluar masuknya anggota. Hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti CV, Firma maupaun Perseroan, jumlah modal biasanya sudah sesuai dengan saham yang dijualnya. Dalam hal ini tidak ada pengaruh antara siapa yang memegang saham dengan jumlah modal yang dihimpun.

Dalam koperasi, adanya hak suara yang sama pada tiap anggota. Artinya hak suara tidak ditentukan oleh besarnya modal yang ditanamkan pada koperasi seperti pada badan usaha non koperasi, melainkan satu orang satu suara. Dengan demikian, tidak mengenal saham mayoritas atau suara dimonopoli oleh orang atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, keuntungan yang dihasilkan koperasi tidak diberikan pada anggota hanya berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan semata melainkan berdasarkan jasa yang diciptakan oleh anggota. Bagi koperasi konsumsi anggota mempunyai transaksi pembelian dengan koperasi terbesar yang berhak menerima SHU terbesar. Sedangkan bagi koperasi produksi yang berhak memperoleh SHU terbesar adalah anggota yang paling banyak melakukan transaksi penjualan dengan koperasi. Jadi, sangat mencolok perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya, dimana deviden diberikan hanya berdasarkan jumlah saham yang mereka punyai.

Pada setiap tutup buku, koperasi diharuskan untuk menyelenggarakan rapat anggota yang intinya melaporkan pada anggota tentang kegiatan selama satu tahun yang telah dijalankan dan menginformasikan apa rencana

yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan. Dengan demikian, koperasi dituntut open manajemen. Hal ini berbeda dengan badan usaha non koperasi, yang lebih tertutup dalam menginformasikan kegiatan usaha dan kebijaksanaannya.

Karena koperasi bergerak atas sepengetahuan dan persetujuan para anggota, maka kekuasaan tertinggi pada koperasi berada di tangan anggota. Hal ini berbeda dengan perseroan misalnya, yang lebih banyak diwarnai dan ditentukan oleh pemegang saham. Perbedaan koperasi dan lainnya dirangkum pada tabel di atas.

Berikut ini ringkasan beberapa perbedaan antara koperasi dengan badan usaha non koperasi.

No	Sik	Prodi	Mata Kuliah	Ket		
1	EKONOMI	1. Akuntansi	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3		
		2. Perpajakan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3		
		3. Manajemen Pemasaran	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3		
		4. Manajemen Perbankan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3		
		5. Manajemen Perhotelan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3		
		9. Manajemen Perkantoran dan Kesekretariatan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3		
		10. Ekonomi Pembangunan	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1		
		11. Studi Manajemen	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1		
		12. Akuntansi	1. Pengantar Ilmu Ekonomi 2. Ekonomi Koperasi	S1		
		13. Ilmu Manajemen	Perekonomian Indonesia	S2		
		14. Magister Manajemen	Perekonomian Indonesia	S2		
		15. Magister Akuntansi	Perekonomian Indonesia	S2		
		2	Ilmu Sosial & Ilmu Politik	16. Ilmu Administrasi Negara	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1
				17. Ilmu-Ilmu Sosial	Perekonomian Indonesia	S2

Tabel 1: Beberapa Perbedaan antara Koperasi dengan Badan Usaha non Koperasi
Sumber : Rozi & Etha, 2002

KONSEPSI KURIKULUM

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (*content*) dan proses penyampaianya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu; (1) pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa, (2) bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada, (3) pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat kemajuan pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah

lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan. (Dikmenum, 1999, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja, Depdikbud, Jakarta).

Dalam arti sempit kurikulum diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran/mata kuliah yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosio-teknologi, maka kurikulum diartikan secara lebih luas sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah/kampus, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual di dalam atau di luar sekolah/kampus (Kerr, dalam Kelly, 1982, dikutip Kwartolo, 2002). Dalam pengertian ini tercakup di dalamnya sejumlah aktifitas pembelajaran di antara subyek didik dalam melakukan transformasi pengetahuan, ketrampilan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rancangan dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar diperguruan tinggi yang terdiri atas :

- 1) Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program

studi, yang memuat tujuan pendidikan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.

- 2) Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. (Pedoman Akademik Universitas DR. Soetomo Tahun 2010/2011)

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERKOPERASIAN

Ditinjau dalam perpektif kebijakan bidang pendidikan perkoperasian, telah lahir Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan dalam upaya membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian. Kebijakan tersebut mestinya menjadi payung hukum atas pengembangan pendidikan perkoperasian melalui jalur pendidikan formal. Kajian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi Surat Keputusan Bersama dua Menteri tersebut di Lembaga Pendidikan Tinggi. Berikut ini merupakan kristal atau pokok-pokok pikiran Surat Keputusan Bersama tersebut.

a. Substansi SKB Pendidikan Perkoperasian

Substansi Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil

Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan dalam upaya membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian adalah diinstruksikan di semua lembaga pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah umum (SMU), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SLB), perguruan tinggi, sanggar belajar (SKB) dan satuan pendidikan luar sekolah untuk memasyarakatkan dan mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan dan menyiapkan kader koperasi dan wirausaha yang profesional.

Khusus lembaga pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem pendidikan, memiliki arti strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia khususnya yang sedang berkarya dan belajar di perguruan tinggi untuk membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian. Hal tersebut dapat terlaksana melalui pengembangan dan intensitas perkoperasian di masing masing kurikulum pada program studi tiap fakultas di lingkungan lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, secara bertahap tahap pendidikan tinggi akan berperan penting dalam mengembangkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi bangsa.

b. Tujuan Diterbitkannya SKB

Tujuan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik

Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/ SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan dalam upaya membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian adalah :

1. Untuk memasyarakatkan dan mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan dan menyiapkan kader koperasi dan wirausaha yang profesional di segala lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi.
2. Untuk lembaga pendidikan tinggi, di semua program studi baik yang berbasis ilmu ekonomi dan teknik ataupun seni menempatkan perkoperasian sebagai matakuliah atau bagian dari sub matakuliah atau pokok bahasan. Dengan demikian, akan menghilangkan kesan bahwa perkoperasian seakan tanggung jawab ilmu ekonomi saja dalam kerangka pemberdayaannya. Untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, semua pihak dituntut terlibat.

METODE KAJIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi kajian ini adalah seluruh instansi penyelenggara pendidikan tinggi di Surabaya. Dari data yang ada bahwa jumlah perguruan tinggi swasta dan negeri di Surabaya berjumlah lebih dari 200 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya.

Adapun sampel yang ditarik secara *purposive sampling* dalam kajian adalah:

- (1) Universitas Airlangga Surabaya

(Unair)

(2) Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

(3) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)

Ruang Lingkup

Kajian ini difokuskan pada Kurikulum Perkoperasian di Perguruan Tinggi, dengan membatasi ruang lingkup pada:

1. Penyelenggaraan pembelajaran perkoperasian.
2. Perkoperasian dalam kurikulum
3. Tujuan, bahan, instrumen, dan teknik pembelajaran
4. Hambatan implementasi kebijakan pendidikan perkoperasian di Perguruan Tinggi.

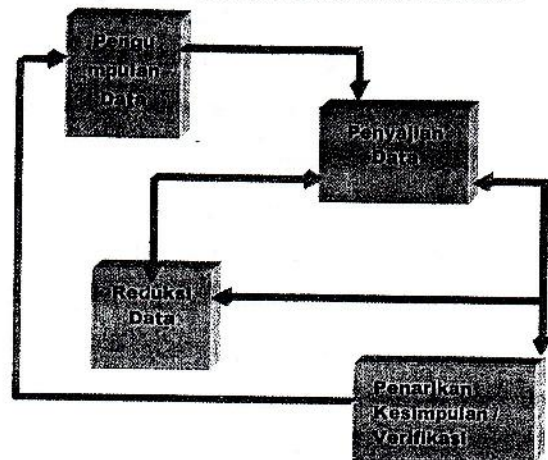
Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian deskriptif, proses pengumpulan data merupakan tahapan penting yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kerja keras dari peneliti. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kajian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif terdiri tiga alur kegiatan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi (Miles, 1984 : 21-23).

Gambar 1: Proses Analisis Data
Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (1992)

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Kurikulum Perkoperasian Di Unair

Pada sub bab ini disajikan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kurikulum perkoperasian di Universitas Airlangga, yang merupakan hasil studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para Ketua Jurusan.

a. Perkoperasian dalam Kurikulum

Universitas Airlangga merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki 11 fakultas, dengan 67 program studi/jurusan dengan jenjang : Diploma-3, Diploma-4, Strata-1 (sarjana), Strata-2 (magister), dan Strata-3 (doktor), serta program pendidikan profesi (spesialis).

Berdasarkan data yang diperoleh dari penjelasan para ketua jurusan di lingkungan Universitas Airlangga menunjukkan bahwa pembelajaran tentang pengetahuan perkoperasian dibagi menjadi 2 (dua) macam kategori, yaitu :

1. Koperasi sebagai Mata Kuliah Mandiri

Mata kuliah yang namanya secara eksplisit menyebut kata "koperasi". Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Ekonomi Koperasi. Dalam mata kuliah ini dipelajari segala pengetahuan tentang perkoperasian.

2. Koperasi sebagai Salah Satu Bahasan dalam Mata Kuliah

Mata kuliah yang namanya secara eksplisit tidak menyebut kata "koperasi" namun sebagian pokok bahasannya adalah tentang koperasi. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah :

- (1) Pengantar Ilmu Ekonomi
- (2) Perekonomian Indonesia.

Dalam mata kuliah ini dipelajari pengetahuan perkoperasian namun hanya garis-garis besarnya saja.

Pada kategori pembelajaran yang pertama, seluruh pokok bahasan dalam mata kuliah Ekonomi dan Koperasi terfokus pada koperasi. Namun pada kategori pembelajaran yang kedua, pengetahuan tentang perkoperasian hanya menjadi sebagian dari pokok bahasan dalam suatu mata kuliah (dalam hal ini mata kuliah : Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perekonomian Indonesia. Berikut penjelasan para Ketua Jurusan yang dalam jurusannya menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah tersebut.

Pada mata kuliah Ekonomi Koperasi : sekitar 80%-90% pokok bahasan berhubungan langsung dan membahas tentang koperasi (sebagai bangun ekonomi) di Indonesia. Namun pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan mata kuliah Perekonomian

Indonesia, hanya sebagian kecil, yakni masing-masing 20% dan 10%. Pada kasus demikian pembelajaran pada 3 (tiga) mata kuliah tersebut belum dapat diandalkan untuk dapat menciptakan daya pikat dan membentuk keahlian dalam berkoperasi.

b. Program Studi Penyelenggara Pembelajaran Perkoperasian

Dari 67 program studi tersebut, hanya 17 program studi yang menyelenggarakan pembelajaran perkoperasian, baik yang tertuang secara eksplisit dalam kurikulum dan silabi serta deskripsi mata kuliah, maupun yang tertuang secara implisit dalam setiap mata kuliah. Data mengenai hal tersebut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1: Sebaran Materi Perkoperasian dalam Kurikulum di Universitas Airlangga

N O	Fak	Prodi	Mata Kuliah	Ke
1	Ekonomi	1. Akuntansi	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3
		2. Perpajakan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3
		3. Manajemen Pemasaran	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3
		4. Manajemen Perbankan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3
		5. Manajemen Perhotelan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3
		9. Manajemen Perkantoran dan Kesekretariatan	Pengantar Ilmu Ekonomi	D3
		10. Ekonomi Pembangunan	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1
		11. Studi Manajemen	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1
		12. Akuntansi	3. Pengantar Ilmu Ekonomi 4. Ekonomi Koperasi	S1
		13. Ilmu Manajemen	Perekonomian Indonesia	S2

No	Fak	Prodi	Mata Kuliah	Ket
		14. Magister Manajemen	Perekonomian Indonesia	S2
		15. Magister Akuntansi	Perekonomian Indonesia	S2
2	Ilmu Sosial & Ilmu Politik	16. Ilmu Administrasi Negara	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1
		17. Ilmu-Ilmu Sosial	Perekonomian Indonesia	S2

Sumber: Data Sekunder diolah

Kurikulum Perkoperasian Di Unesa

Implementasi kurikulum perkoperasian di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang merupakan hasil studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para Ketua Jurusan.

Perkoperasian dalam Kurikulum

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki 8 fakultas, dengan 77 program studi/jurusan dengan jenjang : Diploma-3, Diploma-4, Strata-1 (sarjana), Strata-2 (magister), Strata-3 (doktor).

Berdasarkan data yang diperoleh dari penjelasan para ketua jurusan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa pembelajaran tentang pengetahuan perkoperasian dibagi menjadi 3 (tiga) macam kategori, yaitu :

1. Koperasi sebagai Program Studi
Program Studi Pendidikan Ekonomi – Ekonomi Koperasi, secara eksplisit menyebut kata “koperasi”. Dan dalam Mata kuliahnya syarat dengan kata “koperasi”
2. Koperasi sebagai Mata Kuliah Mandiri

Sebagaimana di UNAIR Mata kuliah yang namanya secara eksplisit menyebut kata “koperasi”. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah antara lain mata kuliah Sejarah Ideologi Koperasi, Koperasi Indonesia, Manajemen Koperasi, Ekonomi Koperasi, Permodalan Koperasi, Pemasaran Koperasi, Akuntansi Koperasi dan Seminar Ekonomi Koperasi . Dalam mata kuliah ini dipelajari segala pengetahuan tentang perkoperasian.

Dalam mata kuliah ini dipelajari segala pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi sebagai Salah Satu Bahasan dalam Mata Kuliah

Mata kuliah yang namanya secara eksplisit tidak menyebut kata “koperasi” namun sebagian pokok bahasannya adalah tentang koperasi. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Dalam mata kuliah ini dipelajari pengetahuan perkoperasian namun hanya garis besarnya saja.

Pada kategori pembelajaran yang pertama dan Kedua, seluruh pokok bahasan dalam mata kuliah Sejarah Ideologi Koperasi, Koperasi Indonesia, Manajemen Koperasi, Ekonomi Koperasi, Permodalan Koperasi, Pemasaran Koperasi, Akuntansi Koperasi dan Seminar Ekonomi Koperasi . terfokus pada koperasi. Namun pada kategori pembelajaran yang ketiga, pengetahuan tentang perkoperasian hanya menjadi sebagian dari pokok bahasan dalam suatu mata kuliah (dalam hal ini mata kuliah : Sistem Ekonomi Indonesia.

Pada mata kuliah Sejarah Ideologi Koperasi, Koperasi Indonesia, Manajemen Koperasi, Ekonomi Koperasi, Permodalan Koperasi, Pemasaran Koperasi, Akuntansi Koperasi dan Seminar Ekonomi Koperasi: 90% pokok bahasan berhubungan langsung dan membahas tentang koperasi (sebagai bangun ekonomi) di Indonesia karena Ekonomi Koperasi masuk dalam Program Studi 10% terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia hanya sebagian kecil, yakni masing-masing 20% dan 10% dan biasanya masuk dalam sub pokok bahasan. Tetapi sayang meskipun Ekonomi Koperasi sudah masuk dalam Program Studi, kaum muda sekarang ada kecenderungan "ogah-ogahan" dengan yang namanya koperasi.

Program Studi Penyelenggara Pembelajaran Perkoperasian

Dari 77 program studi tersebut, hanya 4 program studi yang menyelenggarakan pembelajaran perkoperasian, baik yang tertuang secara eksplisit dalam kurikulum dan silabi serta deskripsi mata kuliah, maupun yang tertuang secara implisit dalam setiap mata kuliah bahkan Program Studi. Data mengenai hal tersebut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2: Sebaran Materi Perkoperasian dalam Kurikulum di Universitas Negeri Surabaya
Sumber: Data Sekunder diolah

No	Fak	Prodi	Mata Kuliah	K E
1	Ekonomi	Pendidikan Ekonomi-Ekonomi Koperasi	1. Sejarah dan Ideologi Koperasi	SI
			2. Koperasi Indonesia	SI
			3. Manajemen Koperasi	SI
			4. Seminar Ekonomi Koperasi	SI
			5. Permodalan Koperasi	SI
			6. Pemasaran Koperasi	SI
			7. Akuntansi Koperasi	SI
			8. Ekonomi Koperasi	SI
		Pend. Ekonomi-Adm. Perkantoran	9. Ekonomi Koperasi	SI
		Pendidikan Tata Niaga	10. Ekonomi Koperasi	SI
2	Ilmu Sosial	Ilmu Administrasi Negara	11. Sistem Ekonomi Indonesia	SI

Kurikulum Perkoperasian Di Unitomo

Pada sub bab ini disajikan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kurikulum perkoperasian di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang merupakan hasil studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para Ketua Jurusan.

a. Perkoperasian dalam Kurikulum

Sebagaimana telah disajikan dalam bab IV, Universitas Dr. Soetomo merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki 8 fakultas, dengan 22 program studi/jurusan dengan jenjang : Diploma-3, Diploma-4, Strata-1 (sarjana), dan Strata-2 (magister). Berdasarkan data yang diperoleh dari penjelasan para ketua jurusan di lingkungan Universitas Dr. Soetomo menunjukkan bahwa pembelajaran tentang pengetahuan perkoperasian dibagi menjadi 2 (dua) macam kategori, yaitu; 1) Koperasi

sebagai Mata Kuliah Mandiri Mata kuliah yang namanya secara eksplisit menyebut kata "koperasi". Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Ekonomi Koperasi, Perekonomian Koperasi dan Koperasi Perikanan. Dalam mata kuliah ini dipelajari segala pengetahuan tentang perkoperasian; 2) Koperasi sebagai Salah Satu Bahasan dalam Mata Kuliah Mata kuliah yang namanya secara eksplisit tidak menyebut kata "koperasi" namun sebagian pokok bahasannya adalah tentang koperasi. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah: 1) Perekonomian Indonesia; 2) Sistem Ekonomi Indonesia; 3) Pengantar Ilmu Ekonomi.

Dalam mata kuliah ini dipelajari pengetahuan perkoperasian namun hanya garis-garis besarnya saja. Pada kategori pembelajaran yang pertama, seluruh pokok bahasan dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi, Perekonomian Koperasi, dan Koperasi Perikanan terfokus pada koperasi. Dan yang menarik disini bahwa Jurusan Perikanan program Sosial Ekonomi Perikanan terdapat mata kuliah yang menempatkan kata "koperasi" secara eksplisit. Namun pada kategori pembelajaran yang kedua, pengetahuan tentang perkoperasian hanya menjadi sebagian dari pokok bahasan dalam suatu mata kuliah (dalam hal ini mata kuliah : Sistem Ekonomi Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perekonomian Indonesia) Berikut penjelasan para Ketua Jurusan yang dalam jurusannya menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah tersebut.

Sebagaimana di UNAIR Pada mata kuliah Ekonomi Koperasi , Perekonomian Koperasi, dan Koperasi Perikanan : sekitar

80%-85% pokok bahasan berhubungan langsung dan membahas tentang koperasi (sebagai bangun ekonomi) di Indonesia. Namun pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perekonomian Indonesia, hanya sebagian kecil, yakni masing-masing 15% dan 10%. Pada kasus demikian pembelajaran pada 5 (lima) mata kuliah tersebut belum dapat diandalkan untuk dapat menciptakan daya pikat dan membentuk keahlian dalam berkoperasi

b. Program Studi Penyelenggara Pembelajaran Perkoperasian

Dari 22 program studi tersebut, hanya 6 program studi yang menyelenggarakan pembelajaran perkoperasian, baik yang tertuang secara eksplisit dalam kurikulum dan silabi serta deskripsi mata kuliah, maupun yang tertuang secara implisit dalam setiap mata kuliah. Data mengenai hal tersebut terdapat pada tabel berikut.

No	PAK	Prodi	Mata kuliah	Kel
1	ILMU ADMINISTRASI	Ilmu Administrasi Negara	Sistem Ekonomi Indonesia	S1
		Administrasi Niaga	Pengantar Ilmu Ekonomi	S1
2	PERTANIAN	Perikanan-Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan	Koperasi Perikanan	S1
3	EKONOMI	Akuntansi Studi Pembangunan Manajemen	Perekonomian Indonesia	S1
			Ekonomi Koperasi	S1
			Perekonomian Koperasi	S1
			Ekonomi Koperasi	S1

Sumber: Data Sekunder diolah

Tujuan, Bahan, Instrumen, Dan Teknik Pembelajaran Perkoperasian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/ SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan dalam upaya membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian adalah; 1) Untuk memasyarakatkan dan mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan dan menyiapkan kader koperasi dan wirausaha yang profesional di segala lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi; 2) Untuk lembaga pendidikan tinggi, di semua program studi baik yang berbasis ilmu ekonomi dan teknik ataupun seni menempatkan perkoperasian sebagai matakuliah atau bagian dari sub matakuliah atau pokok bahasan. Dengan demikian, akan menghilangkan kesan bahwa perkoperasian seakan tanggung jawab ilmu ekonomi saja dalam kerangka pemberdayaannya. Untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, semua pihak dituntut terlibat.

Apabila kita mengacu pada tujuan tersebut, sudah barang tentu pembelajaran, bahan pembelajaran, instrumen pembelajaran, serta teknik pembelajaran memiliki standar tertentu. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa sejumlah standar ideal pembelajaran seperti tersebut di atas tidak dan atau belum diimplementasikan. Tabel berikut merupakan

deskripsi komparasi antara bangun ideal pembelajaran perkoperasian dengan praktek pembelajaran perkoperasian yang senyatanya terjadi di empat perguruan tinggi tempat kajian ini dilakukan.

Tabel 4:Tujuan, Bahan, Instrumen, dan Teknik Pembelajaran Perkoperasian Antara Bangun Ideal dan Kondisi Existing

NO	KOMPONEN	BANGUN IDEAL	KONDISI EXISTING
1	Tujuan Pembelajaran	1) Menciptakan dan atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan koperasi; 2) Membentuk sikap positif (atensi, persepsi, apresiasi) peserta didik terhadap koperasi; 3) Menumbuhkan minat peserta didik untuk memasuki dunia koperasi; 4) Menciptakan keahlian peserta didik untuk dapat menjadi pelaku/pengelola koperasi	Pada tiga perguruan tinggi yang menjadi sampel kajian ini menunjukkan bahwa tujuan pertama dan kedua dapat terimplementasikan dalam praktek pembelajaran. Namun untuk tujuan ke tiga dan ke empat ada indikasi belum dapat dicapai. Ini disebabkan karena proses pembelajaran masih sangat konvensional.
2	Bahan Pembelajaran	Bahan pembelajaran merupakan gabungan dari bahan teks teoritik dan peraturan perundangan tentang perkoperasian, data pendukung, serta bahan yang diperoleh melalui observasi/praktek di lapangan, dengan komposisi masing-masing 30% dan 70%	Bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran perkoperasian cenderung masih konvensional dan sebagian besar bersifat teoritik Bahan pembelajaran yang berbasis pada praktek empiris pengelolaan koperasi pada laboratorium sosi (lapangan) masih amat kurang Komposisi antara materi teori dengan materi praktek adalah 90% dan 10%. Ini merupakan kondisi timpang luar biasa bila dibandingkan dengan bangun idealnya
3	Instrumen Pembelajaran	Instrumen pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana tersebut di atas idealnya adalah : 1) Kelas kecil (<i>moving</i>); 2) Alat kelengkapan kelas seperti white board, LCD Projector, dll; 3) Lembaga Mitra : koperasi, dengan segala instrument pembelajaran yang dimiliki oleh koperasi yang menjadi lembaga mitra; 4) Sistem data perkoperasian yang	Instrumen 1 dan 2 lebih menjadi tumpuan utama. Pada saat yang sama kurang atau bahkan tidak tersedia instrument pembelajaran yang ke-3 dan ke-4.

NO	KOMPONEN	RANGUN IDEAL	KONDISI EXISTEN
		dimiliki oleh baik pemerintah maupun lembaga swasta.	
4	Teknik Pembelajaran	Teknik pembelajaran yang berbasis pada upaya menciptakan kompetensi peserta didik untuk dapat menjadi pengelola koperasi adalah : 1) Studi teori; 2) Studi data primer dan sekunder; 3) Studi banding; 4) Verifikasi kegiatan di lapangan; 5) Praktek mengelola koperasi; 6) Penyusunan Rancangan kegiatan; 7) pengembangan koperasi; 8) Problem solving di seputar pengelolaan kiperasi; 9) Studi di Laboratorium pengembangan koperasi (internal maupun eksternal) perguruan tinggi	Teknik pembelajaran lebih terfokus pada teknik yang pertama, dan kurang memberi perhatian pada teknik ke-2 sampai ke-8. Akibatnya peserta didik kaya wacana namun miskin pengalaman.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/ SKB/2000 belum sesuai dengan yang diharapkan. Keadaan demikian nampaknya tidak boleh dibiarkan berlanjut bila kita semua masih konsisten pada cita-cita bersama untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, serta masih menempatkan lembaga pendidikan formal (dalam hal ini perguruan tinggi) sebagai suatu institusi yang ikut berperan dalam mengembangkan koperasi di tanah air melalui upaya menciptakan kaum muda yang tangguh dan memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi pengelola atau pelaku koperasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan serangkaian data yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya serta berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap sejumlah data tersebut, dapat dirumuskan pokok-pokok pikiran yang merupakan kesimpulan sekaligus jawaban atas pertanyaan kajian. Selanjutnya pada sub bab ini pula dikemukakan sejumlah rekomendasi yang sekaligus dapat menjadi salah satu masukan dalam melakukan rencana tindak pada pasca kajian ini.

Kesimpulan

Secara umum, implikasi Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi, belum signifikan, dalam arti bahwa :

1. Penyelenggara Pendidikan Tinggi belum memasukkan pengetahuan tentang perkoperasian dalam kurikulum di seluruh program studi.
2. Konfigurasi pembelajaran pada mata kuliah dan program studi serta fakultas sebagai berikut :
 - a. Pada mata kuliah yang secara eksplisit muncul nama "koperasi", proporsi pengetahuan perkoperasian sekitar 80%.
 - b. Pada mata kuliah Perekonomian Indonesia proporsi pengetahuan perkoperasian sekitar 20%.
 - c. Pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perekonomian Indonesia,

dimana materi perkoperasian hanya menjadi salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah tersebut, proporsi pengetahuan perkoperasian sekitar 10%.

3. Pada program studi di luar Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial pembelajaran tentang pengetahuan perkoperasian secara implisit tidak diselenggarakan di mata kuliah yang lain.

Saran

Berdasarkan serangkaian kesimpulan yang tertuang dalam sub bab di atas, maka disusun sejumlah ide yang direkomendasikan untuk dapat menjadi rencana tindak bagi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur, terkait upaya mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (sebagai bagian dari upaya mengembangkan koperasi), yaitu:

1. Perlu diselenggarakan kegiatan ilmiah (misalnya seminar, *workshop*, lokakarya, rapat koordinasi, dan sebagainya) sebagai media sosialisasi SKB Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha kecil Menengah tentang Pengembangan Koperasi di Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi dosen pengampu mata kuliah yang mengajarkan perkoperasian.
3. Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi mahasiswa. Pendidikan dan

Pelatihan difokuskan pada praktek manajemen koperasi guna memberi masukan menuju sukses dalam mengelola koperasi mahasiswa dan Studi banding pada koperasi mahasiswa yang sukses

4. Pembekalan bagi calon wisudawan tentang perkoperasian. Ditujukan untuk membentuk *soft skills* tentang perkeopasian dan menumbuhkan minat untuk berkoperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsen, 1976. *Cooperative Business Enterprise*, McGraw-Hill, Inc.USA.
- Anoraga, P dan Ninik Widiyanti, 1993. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Book, Seven-Ake, 1992. *Nilai-nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi*. Terjemahan Djabarudin Djohan, Jakarta: L.KJAN.
- Departemen Koperasi dan PPK, 1995. *Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Beserta Peraturan Pemerintah, Dep.Koperasi dan PPK, Jakarta: Dirjen Pembinaan Koperasi Perkotaan.*
- Dikmenum, 1999. *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja)*, Depdikbud, Jakarta
- Etha, Rozi, (2002). *Ekonomi Koperasi*, Surabaya: Bintang.
- Hasan, S.H. 1996. *Multicultural Issues and Human Resources Development. Paper presented at International Conference on Issues in Education of Pluralistic Societies and Responses to the Global Challenges Towards the Year 2020, Unpublished.*
- Ismangil, Wagiono, 1999. *Wirausaha dan Koperasi*, Usahawan No.07 TH XXVIII Juli 1999.
- Malo, manase & Sri Trisnoningtyas, 1991. *Metode Kajian Masyarakat*, Jakarta: PAU-Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy, 2002. *Metode Kajian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mubyarto & Bromley, 2002. *A Development Alternative for Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mubyarto, 2002. *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mubyarto, Hudiyanto, & Agnes Mawarni, *Ilmu Koperasi*, (konsep), akan terbit.
- Mulyana, Asep, (2002). *Kemakmuran Lewat Koperasi*, Wacana Aktual Edisi I.
- Nugroho, A, 1995. *Sukses Berkoperasi, Pedoman . Mengelola Memajukan Koperasi*, Solo: CV.Aneka.
- Rahardjo, D, 1997. *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*, Jakarta: Dekopin.
- Sanjaya, W, 2006. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Sjahrir, (1986). *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok: Sebuah Tinjauan Prospektif*, Jakarta: LP3ES.
- Utomo. T dan Kees Ruijeter, 1994. *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*, Jakarta: Gramedia.
- Sumber Lain:**
Buku Pedoman Akademik Unair TA 2010/2011
Buku Pedoman Akademik Unesa TA 2010/2011
Buku Pedoman Akademik Unitomo TA 2010/2011
<http://www.bps.go.id>, diakses 12 April 2012
Keputusan bersama menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No.02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor 4/U/SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan dalam upaya membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian